

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN (PPHP) DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 30 Juli 2018

NAMA DAN JABATAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama Pejabat/Pegawai	Jabatan Dalam Penugasan
1.	<p>Ketua: Gunawan Fredyasto NIP. 19870214 201502 1 001 Pranata Barang dan Jasa</p> <p>Anggota: 1) Fenita Enggraini, S.T. NIP. 19851202 201502 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 2) Hilma Oktaviani, S.E. NIP. 19871001 201502 2 001 Analisis Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Unit Kerja: 1) Sekretariat Utama 2) Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 3) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia</p>
2.	<p>Ketua: Doddy Pascal, S.T. NIP. 19840223 201502 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Anggota: 1) Hendra Damendra Numberi, S.E. NIP. 19870202 201407 1 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 2) Ali Masrochan, S.T.P. NIP. 19870926 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama</p>	<p>Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Unit Kerja: 1) Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi 2) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengkah</p>

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN (PPHP) DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 46 TAHUN 2018

TANGGAL : 30 Juli 2018

**NAMA DAN JABATAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Nama Pejabat/Pegawai	Jabatan Dalam Penugasan
1.	Gunawan Fredyasto NIP. 19870214 201502 1 001 Pranata Barang dan Jasa	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Unit Kerja: 1) Sekretariat Utama 2) Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 3) Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
2.	Fenita Enggraini, S.T. NIP. 19851202 201502 2 001 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	
3.	Hilma Oktaviani, S.E. NIP. 19871001 201502 2 001 Analisis Monitoring dan Evaluasi	
4.	Doddy Pascal, S.T. NIP. 19840223 201502 1 001 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Unit Kerja: 1) Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi 2) Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5.	Hendra Damendra Numberi, S.E. NIP. 19870202 201407 1 001 Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	
6.	Ali Masrochan, S.T.P. NIP. 19870926 201502 1 001 Analisis Kebijakan Pertama	

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

SALUSRA WIDYA